

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak diterapkannya otonomi daerah di Indonesia, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang sangat mendasar. UU No. 23 Tahun 2014 dijadikan landasan utama sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal agar otonomi daerah tercapai. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintah daerah untuk melaksanakan semua urusan pemerintah khususnya pada pengelolaan keuangan daerah.² Tujuan utama dari adanya otonomi daerah adalah peningkatan mutu pelayanan terhadap publik yang diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah.³

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi keuangan daerah serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada pembiayaan dari pemerintah pusat.⁴ Menurut Halim (2013) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang

² Neni Nurhayati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah", *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1 (2020), Hal 22.

³ Ester Katerina P. Siagian dan Nurman Setiawan Fadjar, "Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Per-Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012-2021", *Contemporary Studies In Economic, Finance, And Banking*, Vol. 1 No. 3 (2022), Hal 438.

⁴ Verawaty dkk, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan", *MBIA*, Vol. 19, No. 1, (2020), Hal 21.

transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, salah satunya dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya.⁵

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan atas keadilan dan kepatuhan. Apabila pengelolaan daerah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri. Dengan dilakukannya pengukuran pada pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan akuntabilitas daerah tersebut sehingga pemerintahan daerah dituntut mampu membangun pendapatan daerah yang baik.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam

⁵ Budianto & Stanly W Alexander, "Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA Vol.4 No.4 (2016), Hal 845.

⁶ *Ibid*, Hal. 844-851.

wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.⁷ Dalam mendanai kegiatan - kegiatannya setiap daerah memiliki kemampuan mengelola keuangan yang berbeda, hal ini yang menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lain. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah mengalokasikan dana dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 mengatakan bahwa sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah berasal dari PAD dan dana perimbangan. Dalam mewujudkan kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh belanja daerah, penerimaan daerah, dan sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, karena merupakan cerminan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Suatu daerah dikatakan berhasil apabila pemerintah daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, namun kenyataannya pemerintah masih bergantung pada dana bantuan pusat yang

⁷ Yunus Harjito, G. Putra Surya Nugraha dan Yulianto, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Indonesia", Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi Feb. Un Pgrri Kediri Vol. 5 No. 1, (2020), Hal 19-20.

disebut dana perimbangan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini memilih Provinsi Jawa Timur sebagai objek penelitian, dikarenakan Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki posisi strategis di bidang industri karena diapit oleh Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Kondisi tersebut menjadikan Provinsi Jawa Timur sebagai pusat industri dan keuangan kawasan tengah dan timur Indonesia, yang memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi sehingga menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 15%. Kekayaan sumber daya alam, pasar domestik yang luas, digabungkan dengan sarana prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan provinsi Jawa Timur.

Adanya pandemi *Covid-19* yang menyerang Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan penurunan APBD serta penurunan pertumbuhan ekonomi yang kemudian memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satunya pendapatan asli daerah kab/kota di Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terlihat dalam laporan realisasi APBD pada DJPK Kemenkeu. Menurut data Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kab/kota di Provinsi Jawa Timur tidak stabil. Tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah sebesar 39.344,67 miliar

turun cukup jauh menjadi 37.042,89 miliar pada tahun 2020.⁸ Penurunan ini terjadi karena adanya penutupan pemasukan PAD yang berada di suatu daerah. Terutama pada pembayaran pajak sebagai kontributor paling besar. Hal ini menunjukkan jika daerah tersebut masih sangat mengharapkan pembiayaan yang diperoleh dari pemerintah pusat karena Provinsi Jawa Timur memiliki keterbatasan dalam objek pajak yang dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Selain itu, potensi pajak dan retribusi daerah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Realisasi dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa timur juga menunjukkan hal yang sama yaitu cenderung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hampir seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan realisasi dana perimbangan. Pada tahun 2019 realisasi dana perimbangan mencapai 70.477,59 miliar turun menjadi 64.796,11 miliar tahun 2020. Penurunan realisasi dana perimbangan juga diakibatkan oleh wabah *Covid-19* selama Tahun 2020 yang berdampak kepada menurunnya APBN pemerintah pusat dan kemudian berdampak kepada penurunan dana transfer dari pusat ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, hal ini dapat menjadi acuan peneliti untuk menerapkan teori keagenan. Teori keagenan dikembangkan oleh Jensen & Meckling, yang mendefinisikan bahwa teori keagenan merupakan kesepakatan antara 2 pihak antara agen dan principal,

⁸ Devita Ratih Anggraeni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa Timur", Artikel Ilmiah: STIE Perbanas Surabaya, 2020, Hal 3.

yang mana principal memberikan otoritas dan kepercayaan kepada agen dalam mengambil ketentuan yang mengatasnamakan prinsipal.⁹ Teori keagenan yang terkait dengan penelitian ini adalah bahwa pemerintah yang bertindak sebagai agen (manajemen pemerintah) harus menetapkan strategi tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai aktor utama. Prinsipal, dalam hal ini pemerintah, tentu mengharapkan hasil kinerja yang baik dari agen-agensya. Salah satu aspek yang dapat mencerminkan hal ini adalah pelayanan keuangan yang baik dan laporan yang tepat. Kualitas laporan dan pelayanan keuangan yang baik sangat bergantung pada strategi yang diadopsi oleh pemerintah. Apabila pemerintah beroperasi secara efektif, masyarakat akan memiliki kepercayaan terhadapnya. Secara ringkas, pemilihan strategi akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat sebagai prinsipal terhadap pemerintah sebagai agen.¹⁰

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa masyarakat menjadi bertambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Pertumbuhan ekonomi

⁹ Jan Hoesada, *“Teori Akuntansi: dalam Hampiran Historiografis Taksonomis”*, (Yogyakarta: Andi Offset. 2021), Hal 179.

¹⁰ Amin Insani, Dkk, 2023, “Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 1, Hal 113.

¹¹ Basuki Pajoalwanto, *“Perekonomian Indonesia; Tinjauan Histori, Teoritis, Dan Empiris”*, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), Hal 87.

dijadikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.¹²

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota di Provinsi
Jawa Timur Tahun 2018-2022

| Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kab. Pacitan | 5,51 | 5,08 | -1,84 | 2,49 | 5,54 |
| Kab. Ponorogo | 5,31 | 5,01 | -0,90 | 3,19 | 3,24 |
| Kab. Trenggalek | 5,03 | 5,08 | -2,17 | 3,65 | 4,52 |
| Kab. Tulungagung | 5,21 | 5,32 | -3,09 | 3,53 | 5,22 |
| Kab. Blitar | 5,10 | 5,12 | -2,29 | 3,02 | 5,20 |
| Kab. Kediri | 5,08 | 5,07 | -2,41 | 3,06 | 4,90 |
| Kab. Malang | 5,56 | 5,50 | -2,68 | 3,12 | 5,13 |
| Kab. Lumajang | 5,02 | 4,77 | -2,79 | 3,14 | 4,43 |
| Kab. Jember | 5,23 | 5,31 | -2,98 | 4,00 | 4,53 |
| Kab. Banyuwangi | 5,84 | 5,55 | -3,58 | 4,09 | 4,43 |
| Kab. Bondowoso | 5,10 | 5,29 | -1,36 | 3,49 | 3,51 |
| Kab. Situbondo | 5,47 | 5,45 | -2,33 | 3,26 | 4,39 |
| Kab. Probolinggo | 4,47 | 4,56 | -2,12 | 3,35 | 4,52 |
| Kab. Pasuruan | 5,79 | 5,83 | -2,03 | 4,34 | 5,32 |
| Kab. Sidoarjo | 6,02 | 5,99 | -3,69 | 4,21 | 7,53 |
| Kab. Mojokerto | 5,89 | 5,81 | -1,11 | 4,12 | 5,82 |
| Kab. Jombang | 5,44 | 5,06 | -1,98 | 3,24 | 5,37 |
| Kab. Nganjuk | 5,39 | 5,36 | -1,71 | 3,61 | 4,84 |
| Kab. Madiun | 5,10 | 5,42 | -1,69 | 3,32 | 4,32 |
| Kab. Magetan | 5,22 | 5,04 | -1,64 | 3,04 | 3,89 |
| Kab. Ngawi | 5,21 | 5,05 | -1,69 | 2,55 | 3,19 |
| Kab. Bojonegoro | 4,40 | 6,34 | -0,40 | -5,54 | -6,16 |
| Kab. Tuban | 5,17 | 5,14 | -5,85 | 3,00 | 8,88 |
| Kab. Lamongan | 5,45 | 5,44 | -2,65 | 3,43 | 5,56 |
| Kab. Gresik | 5,97 | 5,41 | -3,68 | 3,79 | 7,38 |
| Kab. Bangkalan | 4,22 | 1,03 | -5,59 | -2,07 | -1,12 |
| Kab. Sampang | 4,56 | 1,42 | -0,29 | 0,22 | 2,31 |
| Kab. Pamekasan | 5,46 | 4,92 | -2,54 | 3,41 | 4,66 |

¹² *Ibid*, hal 88.

| | | | | | |
|------------------|------|------|-------|------|------|
| Kab. Sumenep | 3,63 | 0,14 | -1,13 | 2,61 | 3,11 |
| Kota Kediri | 5,43 | 5,47 | -6,25 | 2,50 | 3,95 |
| Kota Blitar | 5,83 | 5,84 | -2,28 | 4,28 | 5,22 |
| Kota Malang | 5,72 | 5,73 | -2,26 | 4,21 | 6,32 |
| Kota Probolinggo | 5,94 | 5,94 | -3,64 | 4,06 | 6,12 |
| Kota Pasuruan | 5,54 | 5,56 | -4,33 | 3,64 | 6,22 |
| Kota Mojokerto | 5,80 | 5,75 | -3,69 | 3,65 | 5,56 |
| Kota Madiun | 5,96 | 5,69 | -3,39 | 4,79 | 5,52 |
| Kota Surabaya | 6,20 | 6,10 | -4,85 | 4,29 | 6,51 |
| Kota Batu | 6,50 | 6,52 | -6,46 | 4,04 | 6,18 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018-2021 dan 2022

Pada tabel 1.1 menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahunnya. Dari ke 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terdapat pada 7 kabupaten/kota diantaranya yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kediri sehingga peneliti tertarik untuk meneliti daerah tersebut.¹³ Pada tahun 2018-2019 laju pertumbuhan masih cenderung stabil, namun tahun 2020 semua kabupaten/kota mengalami penurunan yang tajam dengan angka negatif yang diakibatkan oleh adanya pandemi *Covid-19*. Penyebab terjadinya kontraksi pada tahun 2020 diakibatkan oleh penurunan produksi di setiap daerah. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota mengalami peningkatan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa upaya pemerintah dalam merespons penurunan pertumbuhan ekonomi sangat penting melalui kebijakan yang tepat.

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2017-2022", (2023), dalam <https://jatim.bps.go.id/indicator/162/527/1/-seri-2010-pertumbuhan-ekonomi-menurut-kabupaten-kota.html>. Diakses 7 September 2023.

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, karena ini akan membantu menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konsep makro, dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka semakin besar potensi penerimaan daerah. Dengan demikian, peningkatan PDRB akan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah.¹⁴ Kekuatan serta kemampuan yang juga dimiliki pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, harus diselaraskan dengan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang modern bukan tidak mungkin laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur akan mengalami perubahan yang lebih baik setiap tahunnya.

Dana Perimbangan merupakan bagian dari dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (*vertical imbalance*), dan ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*), serta mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah.¹⁵ Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah, disebutkan bahwa dana perimbangan

¹⁴ Indrajati Hertanto dan Jaka Sriyana, "Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 12, No. 1, (2011), hal 77-78.

¹⁵ Ahmad Nurkhat, Muhammad Firdaus, & Sri Mulatsih, "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan Di Indonesia, *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*", Vol. 10, No. 1, (2018), Hal. 36.

terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).¹⁶

Tabel 1.2
Dana Perimbangan 7 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2022 (Milyar)

| Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kota Surabaya | 2.089,13 | 2.070,63 | 2.068,94 | 2.237,49 | 2.583,72 |
| Kab. Sidoarjo | 1.805,36 | 1.780,04 | 1.720,50 | 1.735,49 | 1.977,52 |
| Kab. Gresik | 1.425,18 | 1.475,60 | 1.337,57 | 1.406,27 | 1.573,80 |
| Kab. Pasuruan | 1.858,32 | 1.898,23 | 1.760,80 | 1.787,62 | 2.020,78 |
| Kota Malang | 1.181,40 | 1.219,55 | 1.103,78 | 1.152,74 | 1.229,94 |
| Kab. Jember | 2.347,41 | 2.439,11 | 2.207,12 | 2.252,53 | 2.482,59 |
| Kota Kediri | 880,61 | 909,61 | 857,37 | 873,32 | 1.022,96 |

Sumber: DJPK Kemenkeu

Pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, tetapi hal ini berbeda pada tahun 2020 dimana, dana perimbangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan cukup besar. Akan tetapi di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup dari besaran anggaran dana perimbangan tahun 2020, khususnya di Kota Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kediri.¹⁷

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari berbagai usaha pemerintah daerah guna mengumpulkan dana untuk keperluan daerah

¹⁶ Budianto & Stanly W Alexander, "Pengaruh PAD Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara", Jurnal EMBA Vol.4 No.4 (2016), Hal 847.

¹⁷ Kementerian Keuangan, dalam <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>, diakses 19 Oktober 2023.

yang tersebut dalam membiayai pembangunannya, yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha milik daerah, dan lain-lain penerimaan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri.¹⁸ Pendapatan asli daerah dianggap sebagai tulang punggung pemasukan daerah, hal ini sangat dianggap penting dalam kontribusi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.3
Pendapatan Asli Daerah7 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018-2022 (Milyar)

| Kab/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kota Surabaya | 4.972,89 | 5.381,92 | 4.289,96 | 4.727,28 | 5.314,70 |
| Kab. Sidoarjo | 1.685,56 | 1.689,95 | 1.798,52 | 1.921,24 | 1.801,98 |
| Kab. Gresik | 957,26 | 980,78 | 924,66 | 1.031,39 | 1.191,80 |
| Kab. Pasuruan | 614,3 | 650,89 | 700,15 | 701,20 | 736,24 |
| Kota Malang | 556,89 | 588,07 | 491,19 | 603,79 | 718,34 |
| Kab. Jember | 597,51 | 597,51 | 593,18 | 635,31 | 640,46 |
| Kota Kediri | 249,09 | 266,75 | 262,89 | 439,90 | 319,30 |

Sumber: DJPK Kemenkeu

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2019 mengalami sedikit peningkatan, tetapi hal ini berbeda pada tahun 2020 dimana, tahun 2020 pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan cukup besar. Akan tetapi di tahun 2021-2022 mengalami peningkatan yang cukup dari besaran anggaran pendapatan asli daerah tahun 2020, khususnya di Kota

¹⁸ Indrajati Hertanto, "Sumber Pendapatan Asli Daerah...Hal. 80.

Surabaya, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Kediri.

Realisasi pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menunjukkan peningkatan PDRBnya, dan memiliki kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya wabah pandemi yang menyebabkan pendapatan masyarakat menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Dwi Heryanti dkk menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dana perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan dana perimbangan akan menurunkan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan yang berarti kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, tidak selalu diikuti oleh kenaikan kinerja keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Sedangkan menurut Novita Sari menyatakan bahwa Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat tahun 2016-2020. Suatu daerah dapat dikatakan

berhasil apabila pemerintah daerah tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatnya secara signifikan setiap tahunnya. Keberhasilan otonomi daerah tersebut dapat dilihat dari pendapatan asli daerah, namun kenyataannya pemerintah daerah masih bergantung pada dana bantuan pusat yang disebut dana perimbangan. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki peranan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada penelitian terdahulu ditemukannya inkonsistensi dalam hasil penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali dan memperkuat bukti empiris baru. Data yang digunakan pada penelitian sebelumnya pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, sedangkan penelitian ini pada pemerintah kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan PAD selama periode 2018-2022.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Maka penulis ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, dan**

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini yang akan dijadikan bahan pada penelitian selanjutnya yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur skala aktivitas perekonomian untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat pada periode yang telah ditentukan.
2. Dana perimbangan daerah bergantung pada dukungan pemerintah pusat, hal ini menunjukkan bahwa harus professional dalam kinerja untuk menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.
3. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pendapatan daerah, hal ini dinilai sangat penting untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Dana pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja keuangan pemerintah, karena kinerja pemerintah merupakan cerminan keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan untuk kepentingan mencapai kesejahteraan sosial.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022?

2. Apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022?
3. apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.
2. Untuk menguji pengaruh dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.
3. Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.
4. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan kab/kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melakukan penelitian tersebut, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan landasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan tambahan wawasan bagi para pembaca, selain itu agar mampu dijadikan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan tambahan informasi mengenai kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah, serta diharapkan dapat dijadikan pedoman khususnya bagi instansi pemerintah daerah. Selain itu, dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan peran dan fungsi informasi.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan mengenai pengambilan kebijaksanaan yang lebih baik dimasa mendatang. Terutama untuk memberikan tambahan informasi, dan masukan serta menyampaikan saran yang mungkin dapat

bermanfaat bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk peneliti selanjutnya di masa yang akan datang.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berkaitan dengan variabel independent yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Pendapatan Asli Daerah (X3). Sedangkan variabel dependennya yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur 2018-2022.

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan tertentu untuk membuatnya lebih mudah melakukan penelitian dan mungkin hasilnya akurat karena yang diteliti spesifik tidak menyeluruh. Berdasarkan ruang lingkup penelitian di atas, penelitian ini menggunakan data yang tersedia di situs web Badan Pusat Statistik. Ini karena peneliti tidak dapat melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sebab terkendala waktu dan tempat penelitian yang jauh dari lokasi peneliti dan membutuhkan waktu yang lama.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan produksi barang dan jasa masyarakat menjadi bertambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹ Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP), tanpa peduli apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah ada perubahan struktur ekonomi.²⁰

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.²¹

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

¹⁹ Basuki Pajoalwanto, “*Perekonomian Indonesia; Tinjauan Histori, Teoritis, Dan Empiris*”, (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2013), Hal 87.

²⁰ Syamsudin, Bayu Tri Cahya, & Syahrina Nurmala Dewi, “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan” *Jurnal Manajemen*, Vol. 17, No. 1 (2015), Hal. 17-18.

²¹ Moh. Khusaini, “*Keuangan Daerah*”, (Malang: UB Press, 2018), Hal 93.

peraturan perundang – undangan.²² Menurut Solikhah dan Wahyudin (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penerimaan daerah yang sangat penting untuk membantu laju pembangunan di daerah, adanya pendapatan asli daerah dijadikan sebagai modal untuk membiayai belanja daerah dan juga dijadikan tolak ukur dari keberhasilan daerah dalam mewujudkan daerah mandiri yang sesuai dengan konsep desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.²³

d. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu sistem untuk menilai manajer publik, unit organisasi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, dan tidak hanya menunjukkan kemampuan bahwa uang publik tersebut digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif serta sesuai anggaran yang telah dibuat.²⁴

2. Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian “Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur” dalam penelitian ini adalah

²² Suwandi, “*Desentralisasi Fiskal: Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua*”, (Yogyakarta: Deepulish, 2015), Hal. 47.

²³ Nadia Setyarini & Sri Rustiyaningsih, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa)”, *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 09 No. 01, (2021), Hal 15.

²⁴ Verawaty, dkk, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan”, *MBIA*, Vol. 19, No. 1, (2020), hal. 24.

untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kab/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, dan juga definisi operasional.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan variable yang akan diteliti yang meliputi pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, kinerja keuangan pemerintah. Dengan tujuan untuk memperkuat pokok yang akan diteliti. Bab ini juga membahas mengenai kajian penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai jawaban sementara dan digunakan untuk membandingkan dengan yang sedang dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menerangkan tentang populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, variable penelitian, dan sumber data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini digunakan untuk menganalisis dari bab III, sehingga diketahui hasil penelitian berupa adanya keterkaitan antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah diujikan.

BAB V HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan mengenai hasil dari rumusan masalah dalam penelitian yaitu pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Diprovinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022. yang bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian membandingkannya dengan teori ataupun dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait dengan hasil pembahasan dan hasil penelitian. Serta berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.